BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi untuk menghadapi persaingan yang matang di era modernisasi ini. Pada era globalisasi, berarti dunia nantinya seolah tanpa memiliki batas-batas wilayah dan waktu. Dalam waktu bersamaan, pasar bebas atau liberalisasi perdagangan semakin nyata adanya. Sedangkan berbicara mengenai pasar bebas atau liberalisasi perdagangan berarti berkaitan dengan permasalahan ekonomi.[1]

Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan usaha di Indonesia sangat vital bagi roda perekonomian di Indonesia. Para pelaku ekonomi berupaya untuk membangun perekonomian yang dapat turut serta membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia. Koperasi merupakan bagian tiga pilar ekonomi yang turut serta membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.[2]

Tujuan utama dari kegiatan koperasi ini juga memiliki kekhusussan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada

[1] Lita Ayudha Ningsih. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)." (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 2.

[2] Via Aulia Sari. "Analisis Kinerja Manajemen Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah "Amanah" Di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, 2021), 17.

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UU No.25/1992 pasal 3). Hal ini menjadikan koperasi dipandang sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Dari berbagai jenis tuntutan tersebut muncullah berbagai jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.[3]

Dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah membuka usaha tentunya membutuhkan modal usaha sebagai hal yang paling utama. Perihal modallah terkadang menjadi hambatan masyarakat dalam mewujudkan usahanya. Oleh karena itu, di sinilah peran peran sesungguhnya koperasi yang dirasakan lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi solusi mereka akan tetapi eksistensi produk yang ditawarkan koperasi belum menyebar luas di telinga masyarakat, terkhusus pada koperasi syariah di masyarakat desa maupun kota.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan penduduknya mayoritas beragama Islam, maka dari itu segala sesuatu yang bernafaskan Islam mulai berkembang, mulai dari gaya berbusana, gaya hidup, sampai berbagai badan usaha dan lembaga keuangan. Kini banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam yang lebih sering disebut prinsip syari'ah, seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, termasuk juga koperasi syari'ah.[4]

Islam sebagai sistem hidup *(way of life)* dan agama yang *universal* memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi islam yang menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, hal ini mendorong

---

[3] Via Aulia Sari. "Analisis Kinerja Manajemen Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah "Amanah" Di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, 2021), 17.

[4] Via Aulia Sari. "Analisis Kinerja Manajemen Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah "Amanah" Di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, 2021), 19.

terbentuknya suatu ilmu ekonomi yang berbasis keislaman yang fokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.[5]

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "koperasi syariah", sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga).[6] Islam menganggap riba sebagai salah satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral dan jika kondisi masyarakat rusak tentunya akan berdampak bagi tatanan negara. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam untuk memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana dengan berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadikan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan mampu bersaing. Sebagaimana yang kita lihat bahwa saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun demikian, kemajuan di bidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah.

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi.

---

[5] Lita Ayudha Ningsih. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)." (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 5.

[6] Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Patumbak, UU Perss, 2002), h. 1.

Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah, karena mereka percaya bahwa aturan Islam adalah aturan terbaik sebagai pengatur kehidupannya.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.[7]

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.[8]

---

[7] Cantika Ayu Wardhani. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Program Strata Satu (S1) Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung), 5.

[8] Cantika Ayu Wardhani. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.[9]

KSPPS sama hal nya dengan BMT, dimana terbagi menjadi dua bidang yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* (harta), lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Baitut Tamwil* (usaha), sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana *komersial*.

Pendapatan *baitul maal* berasal dari uang yang disediakan oleh donatur atau sengaja dikumpulkan untuk suatu tujuan biasanya disebut dana[10], sedangkan dana sosial sendiri adalah dana yang sumbernya dapat berasal dari zakat, infaq, sadaqah dan wakaf atau bisa dari pendapatan lainnya. Pengelolaan dana sosial dalam BMT sendiri dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah yaitu dengan akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *Tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Manajemen pengelolaannya pun tidak boleh sembarangan yaitu harus meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang

---

Lampung)." (*Skripsi*, Program Strata Satu (S1) Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung), 5-6.

[9] Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah,* Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), 385.

menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.[11]

Sebagai Lembaga Sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan demikian, *Baitul Maal* ini harus didorong dan dipicu agar dapat berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan dan benar-benar bermanfaat bagi umat. Fungsi tersebut diharapkan setidaknya meliputi upaya pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiahnya.[12]

Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif, disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (mustahiq) yang membutuhkan lebih merata. Ada sebuah contoh dari negara Cina yang mana kemajuan ekonomi mereka yang semakin pesat belakangan ini dikarenakan pemerintah Cina memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan, pakaian, hingga suku cadang otomotif yang dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Implikasi positifnya, Cina menjadi negara yang paling cepat dalam ekonomi dewasa ini.[13]

Dengan contoh diatas, upaya mewujudkan optimalisasi peran BMT dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara maju. BMT bersama dengan pemerintah haruslah membuat suatu rancangan program

---

[11] Lugy Mia Astriana, "Manajemen Pengelolaan Dana Sosial *Baitul Maal* Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa." (*Skripsi*, Program Sarjana Strata satu (S1) pada Prodi Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang, 2018), 3.

[12] Soritua Ahmad Ramdani H dan Mohmmad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Hukum Falah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 20-21.

[13] Soritua Ahmad Ramdani H dan Mohmmad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Hukum Falah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 24.

pengembangan wirausaha pada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, BMT harus menetapkan skala prioritas progam jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan secara optimal baik dalam skala lokal maupun nasional. Pada intinya, BMT diharapkan dapat mampu menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.[14]

Dapat disimpulkan bahwa peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pengembangan *Baitu Maal Wat Tamwil* sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil dan menegah, keberadaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kehidupan. Pertumbuhan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang cukup pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, maka cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dengan itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan kesejahteraan hidup mereka.

Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka berdasarkan BPS Kabupaten Majalengka menjadikan pusat perekonomian melalui pasar dan terminal dengan memiliki sejumlah sarana lembaga keuangan bank dan koperasi yang mendukung kegiatan ekonomi dengan salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).[15]

Tabel 1. Data Pelaku Usaha Kecil Menegah Rajagaluh Majalengka 2020[16]

[14] Soritua Ahmad Ramdani H dan Mohmmad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Hukum Falah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 24.

[15] https://majalengkakab.bps.go.id , (Diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 14.02 WIB).

[16] https://majalengkakab.bps.go.id , (Diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 14.02 WIB).

No.	Desa	Toko/Warung kelontong	Warung/Kedai Makanan
1.	Pajajar	32	7
2.	Teja	35	4
3.	Payung	50	5
4.	Sindangpano	22	3
5.	Babakankareo	32	4
6.	Sadomas	51	5
7.	Kumbung	135	15
8.	Rajagaluh Kidul	125	65
9.	Singawada	60	13
10.	Rajagaluh	52	25
11.	Rajagaluh Lor	108	22
12.	Cipinang	63	20
13.	Cisetu	33	7
	Total	798	195

Tabel 2. Data Banyaknya Koperasi Yang Masih Aktif di Rajagaluh Majalengka 2020[17]

No.	Desa	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi Industri Kecil dan Kerajian Rakyat (Kopinkra)	Koperasi Smpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
1.	Pajajar	0	0	0	0
2.	Teja	0	0	0	0
3.	Payung	0	0	0	0
4.	Sindangpano	0	0	0	0

[17] https://majalengkakab.bps.go.id , (Diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 14.02 WIB).

5.	Babakankareo	0	1	0	0
6.	Sadomas	0	0	0	0
7.	Kumbung	0	0	0	0
8.	Rajagaluh Kidul	0	0	0	0
9.	Singawada	0	0	0	0
10.	Rajagaluh	0	1	0	0
11.	Rajagaluh Lor	0	0	1	0
12.	Cipinang	0	0	0	0
13.	Cisetu	0	0	0	1
Total		0	2	1	1

Penulis mengambil sempel data dari jumlah UKM dan jumlah koperasi yang aktif di kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka untuk mengetahui pencapaian koperasi dalam mewujudkan perannya sebagai pilar ekonomi. Bedasarkan tabel 1 dan tabel 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi yang menjadi salah satu pendukung kegiatan ekonomi sangat berbanding terbalik dengan jumlah Usaha Kecil Menegah yang ada, sehingga menurut penulis peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian belum tercapai secara baik sehingga masyarakat masih terkendala dalam pertumbuhan perekonomiannya terkhusus pada usaha yang dijalaninya sebagai penunjang kehidupan.

Oleh karena itu, sangat diharuskan peningkatan peran koperasi sebagai perwujudan konsep ekonomi kerakyatan. Dan penulis melihat bahwa KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan pengembangan dari koperasi pondok pesantren Al-Ishlah yang sudah tumbuh dan dipercaya selalu berupaya memberdayakan masyarakat kecil bawah khususnya lingkungan pesantren untuk tetap eksis dalam mengembangkan usahanya dan untuk memenuhi hajat hidupnya, dengan bukti nyatanya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera telah berhasil menjadikan lembaga keuangan syariah dengan memiliki

kantor pusat dan 7 kantor cabang di wilayah III yaitu Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka, salah satunya adalah kantor cabang kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka yang sebagai objek penelitian penulis kali ini. KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera berpusat di kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon.

Maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam Pemberdayaan Perekonomian masyarakat terkhusus untuk anggota KSPPS yang merasakan secara langsung manfaatnya. Adapun judul yang dipilih adalah **"PERAN DAN STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN ANGGOTA (Analisis Kasus Pada KSPPS Al- Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka Perspektif Permen RI Nomor 7 Tahun 2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana program pemberdayaan pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
3. Bagaimana peran dan strategi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut Permen RI Nomor 7 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program pemberdayaan pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Untuk mengetahui peran dan strategi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut Permen RI Nomor 7 Tahun 2021.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Perwujudan Konsep Ekonomi Kerakyatan telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan pada permasalahan yang berbeda di setiap objek penelitiannya yang secara umum mengenai pemberdayaan usaha kecil menengah di masyarakat. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1) Jurnal karangan Fransisca Mulyono dengan judul "Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Indonesia". Penelitian ini bertujun untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mempertahankan dan memberdayakan pasar tradisional yang telah terjepit oleh pasar modern dengan adanya koperasi sebagai pemberdaya ekonomi rakyat Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.[18]

[18] Fransisca Mulyono, "Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis,* Vol. 6 No.1 (Agustus 2010): 2.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu strategi yang digunakan koperasi dalam upaya menghadapi kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah permasalahan suatu kondisi yang terjadi pada pasar tradisional yang keberadaannya terjepit oleh pasar modern dan penelitian tersebut tidak disertai dengan perspektif hukum formil. Sedangkan pada penelitin ini yang dibahas adalah mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota dan disertai pespektif hukum formil.

2) Skripsi karangan Putri Wulan Dari dengan judul "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi)". Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di BMT Al-Ishlah, dampak positif dan negatif dari pembiayaan di Koperasi BMT Al-Ishlah serta peran dan strategi yang dilakukan oleh koperasi BMT Al-Ishlah agar masyarakat mau bergabung. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.[19]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu peran koperasi syariah dalam upaya menghadapi kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah permasalahan suatu kondisi yang terjadi pada usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan penelitian tersebut tidak disertai dengan perspektif hukum formil. Sedangkan pada

[19] Putri Wulan Dari. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi)." (*Skripsi*, Program Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 27.

penelitin ini yang dibahas adalah mengenai Peran dan Strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota koperasi dan disertai pespektif hukum formil.

3) Skripsi karangan Dzannur Ida Miladia dengan judul "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)." Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai peranan KSPPS KOPENA Kota Pekalongan melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota dalam peningkataan kesejahteraan anggota atau calon anggota. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner.[20]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu peranan koperasi syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dengan disertai perspektif hukum. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah bagian simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Pemuda Buana KSPPS KOPENA Pekalongan. Sedangkan pada penelitin ini yang dibahas adalah mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota koperasi.

4) Jurnal karangan Mia Sapitri, Deden Sumpena dan Dedi Herdiana dengan judul "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah". Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat BMT

[20] Dzannur Ida Miladia. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)." (*Skripsi*, Program Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 67.

Mitrass dalam memberdayakan usaha kecil menengah. Hasil penelitiannya bahwa peranan BMT Mitrass dalam pemberdayaan yaitu dengan sistem kerja yang dijalankan ini antara lain penghimpunan dana dan prnyaluran dana. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.[21]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan perekonomian. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah mengenai pemberdayaan nya untuk Usaha Kecil Menengah dengan objek penelitiannya adalah BMT Mitrass dan tanpa disertai pendekatan secara hukum formil. Sedangkan pada penelitin ini yang dibahas adalah mengenai pemberdayaan perekonomian untuk anggota koperasi dengan objek penelitian pada BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka disertai pendekatan secara hukum formil.

5) Jurnal karangan Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub dengan judul "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA". Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai tugas dan peran BMT terhadap pemberdayaan usaha pedagang kecil di Pasar Pucang dengan menerapkan beberapa program yang sudah terbukti keberhasilannya. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.[22]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas mengenai peran BMT dalam

[21] Mia Sapitri, Deden Sumpena dan Dedi Hrdiana, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah", *Jurnal Pengambangan Masyarakat Islam,* Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017): 39.

[22] Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 6 No.11 (November, 2019): 2326.

pemberdayaan perekonomian. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah kondisi perekonomian di Pasar Pucang yang menurun sehingga diperlukan pemberdayaan perekonomian. Sedangkan pada penelitin ini yang dibahas adalah mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota koperasi disertai dengan pendekatan hukum formil.

6) Skripsi karangan Muslihati dengan judul "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan". Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai peran penting BMT dalam memberdayakan ekonomi perempuan sehingga dampak yang diperoleh kaum perempuan adalah pendapatan mereka bertambah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan berpotensi besar untuk kemajuan generasi penerus dimasa mendatang. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosiologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.[23]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan perekonomian. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan terkhusus yang berada di Makassar karena posisi perempuan sebagai wakil kepala rumah tangga yang dapat mendukung dalam pemenuhan pendapatan rumah tangga selain suami terutama bagi keluarga kurang mampu. Sedangkan pada penelitin ini yang dibahas adalah mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota koperasi

[23] Muslihati. "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, 2015), xi.

sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat dari program-program BMT.

7) Jurnal karangan Fauzi Arif Lubis dengan judul "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)." Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai karasteristik pelanggan yang merupakan objek pemberdayaan, mengenai bentuk dan hasil dari pemberdayaan yang dilakukan BMT Mitra Simalem Al-Karomah. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang berupaya mengumpulkan data-data lapangan didukung dengan berbagai informasi dan literature yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[24]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan perekonomian. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah berfokus pada pemberdayaan pada nasabah BMT Mitra Simalem Al-Karomah dan tidak disertai pendekatan hukum formil. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian anggota koperasi disertai dengan pendekatan hukum formil.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN ANGGOTA KSPPS AL-ISHLAH RAJAGALUH MAJALENGKA

[24] Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)", *Jurnal Human Falah*, Vol 3 No 2 (JUli-Desember, 2016), 282.

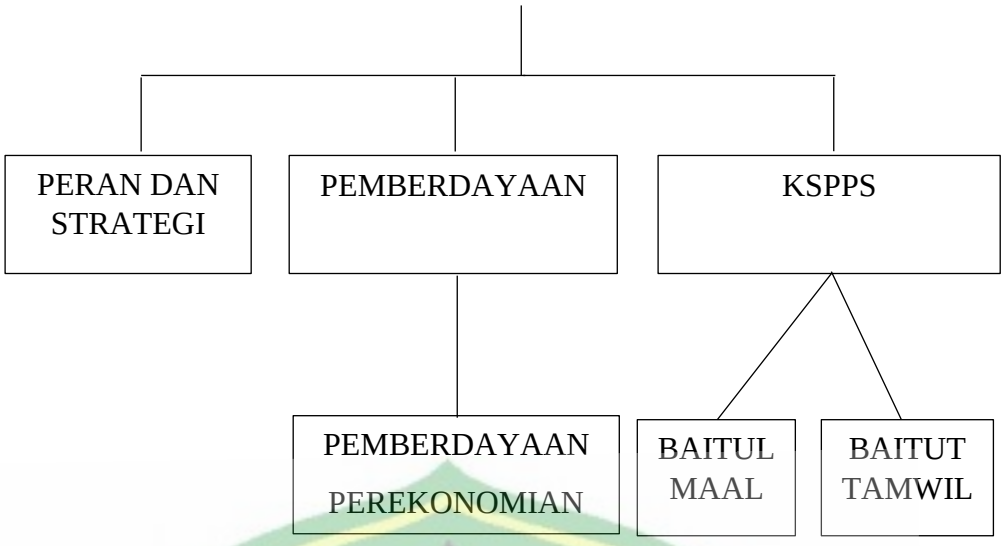

Penjelasan :

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.[25] Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Menurut Khan, teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat.[26] Linton seorang antropolog, telah menggambarkan teori peran dengan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.[27]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang

[25] Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Jaya, 2003), 1.

[26] Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* di Wilayah DKI Jakarta)", *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No.1, Mei 2009:40-69 (Bandung, 2009), 42.

[27] Dzannur Ida Miladia. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)." (*Skripsi*, Program Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 13.

dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.[28]

Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.[29] Strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan.[30]

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, dengan cara memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Pemberdayaan harus mengembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitas (pemerasan) kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

---

[28] Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No.11 (November, 2019): 2309.

[29] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013) 167.

[30] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013) 172.

4. Penyongkongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayan harus mampu menyongkong masyarakat miskin agar tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.[31]

Pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini, dalam pemberdayaan masyarakat dididik untuk menerapkan setiap informasi baru yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan UKM perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[32]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ali-`Imrân* [3]: 110.[33]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ...

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...*" (*Qs. Ali-`Imrân* [3]: 110).

---

[31] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 172

[32] Enden Khairunnisa Ulfah. "Strategi BMT AL-FALAH Kabupaten Cirebon Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 14.

[33] Depag. RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), 65.

Ayat di atas menjelaskan, *kamu* wahai seluruh umat Muhammad dari generasi ke generasi berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah *adalah umat yang terbaik* karena adanya sifat-sifat yang mengiasi diri kalian. Ini karena kalian adalah umat yang terus-menerus tanpa bosan *menyuruh kepada yang ma"rūf,* yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai ilahi *dan mencegah yang munkar*, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai pada batas menggunakan kekuatan *dan* karena *kalian beriman kepada Allah*, dengan iman yang benar sehingga atas dasarnya kalian percaya dan mengamalkan tuntunan-Nya dan tuntunan Rasul-Nya, serta melakukan *amr ma'rūf dan nahi munkar* itu sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya. Inilah yang menjadi kalian meraih kebajikan. Dalam konteks sosiologi, umat adalah himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama.[34]

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata "daya" yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Ada upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, yaitu, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan terjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.[35]

---

[34] Enden Khairunnisa Ulfah. "Strategi BMT AL-FALAH Kabupaten Cirebon Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah." (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 15.

[35] Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No.11 (November, 2019): 2314.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya memberikan bantuan motivasi moriil. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Allah SWT.[36]

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat pasrtisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up,* dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang, sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi itulah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan (tujuan, materi, metode, alat evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini, merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan program pemberdayaan.[37]

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (labolatorium). Suatu model cenderung harus

---

[36] Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 6 No.11 (November, 2019): 2314.

[37] Mia Sapitri, Deden Sumpena dan Dedi Hrdiana, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah", *Jurnal Pengambangan Masyarakat Islam,* Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017): 25.

membuat dulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.[38]

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu entitas keuangan mikro syariah yang terdapat di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), maka dalam melaksanakan fungsi dan peranannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan di sisi lain melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.[39]

Koperasi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam hal yang dilarang.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWTdalam Surah Al-Maidah [5]: 2.[40]

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ ...

[38] Mia Sapitri, Deden Sumpena dan Dedi Hrdiana, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah", *Jurnal Pengambangan Masyarakat Islam,* Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017): 27.

[39] Dzannur Ida Miladia. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)." (*Skripsi*, Program Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 17.

[40] Depag. RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002).

Artinya: *"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."* (QS. Al-Maidah: 2)

Baitul Mal pertama kali dirumuskan dan didirikan oleh Rasulullah SAW dengan sangat sederhana. *Baitul Mal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (aljihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Hal tersebut dibuktikan dengan riwayat yang menyebutkan pendelegasian tugas *baitul maal* oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang sahabat tertentu, seperti tugas pencatatan, tugas penghimpunan zakat hasil pertanian, tugas pemeliharaan zakat hasil ternak, dan juga pendistribusian. Hal itu menjadi landasan yang kuat bagi *baitul maal* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sekalipun belum dalam bentuk institusi yang baku. Selanjutnya, dimasa pemerintahan Abu Bakar tidak terlalu ada perubahan yang besar berkaitan dengan *baitul maal*.[41]

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat *baitul maal* dan *baitut tamwil* yang dalah operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip- prinsip syariah.[42]

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam

---

[41] Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, "PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No.11 (November, 2019): 2310.

[42] Cantika Ayu Wardhani. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Program Strata Satu (S1) Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung), 19.

melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqah, Wakaf).[43] Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).

KSPPS sama hal nya dengan BMT, dimana terbagi menjadi dua bidang yaitu *baitul maal* (harta) yang disalurkan untuk dana sosial dan *at-tamwil* (usaha) yang dimanfaatkan dalam bidang usaha. Hanya saja, dalam KSPPS yang lebih dominan nya bergerak pada bidang usaha.

Sebagai Lembaga Sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan demikian, *baitul maal* ini harus didorong dan dipicu agar dapat berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan dan benar-benar bermanfaat bagi umat. Fungsi tersebut diharapkan setidaknya meliputi upaya pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiahnya.[44]

Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif, disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (mustahiq) yang membutuhkan lebih merata.[45]

Peran KSPPS dalam *masyarakat* sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri yaitu sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, sebagai sarana pendidikan

---

[43] www.pembiayaansyariahkukm.info , dikases pada 28 Mei 2021 pukul 09.58 WIB.

[44] Soritua Ahmad Ramdani H dan Mohmmad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *HukumFalah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 20-21.

[45] Soritua Ahmad Ramdani H dan Mohmmad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *HukumFalah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 24.

informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah dengan menjalankan setiap kegiatan dan usaha sesuai dengan prinsip Islam dan sebagai penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin). Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terus menerus, bertahap dan terpadu didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong mereka sendiri dalam persaingan globalisasi. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam kehidupan manusia sebagai mencapai kesehteraan hidup.

Ada beberapa hal penting, mengapa KSPPS perlu dikembangkan di Indonesia dan di berbagai daerah. Salah satu tujuan didirikannya KSPPS adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro dikarenkan tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. Maka, kehadiran KSPPS dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.[46] Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan peran dan strategi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam pemberdayaan perekonomian

[46] Ina Septiani. "Pengembangan Objek Wisata Situ Cipanten Majalengka Di Tengah Kondisi *New Normal* Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)", (*Proposal Skripsi*, Program Sarjana Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 18.

anggota. Hasil penelitiannya diketahui bahwa manajemen dan strategi yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh secara alamiah, menghasilkan data yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik ataupun prosedur kuantifikasi lainnya untuk mengolah hasil temuannya.[47] Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.[48] Adapun penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yang pertama yaitu menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore)* dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain).*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.[49] Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "PERAN DAN STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM

[47] David Hizkia Tobing, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif", (*e-book,* Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS UDAYANA, 2016), 8.

[48] Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

[49] Ina Septiani. "Pengembangan Objek Wisata Situ Cipanten Majalengka Di Tengah Kondisi *New Normal* Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)", (*Proposal Skripsi,* Program Sarjana Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 20.

PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN ANGGOTA (Analisis Kasus Pada KSPPS AL-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka Perspektif Permen RI Nomor 7 Tahun 2021)" penelitian langsung kepada ketua koperasi syariah dan jajaran nya, dengan cara melakukan observasi melalui wawancara dengan Kepala Cabang Koperasi sebagai pengelola program pemberdayaan, dan mitra koperasi sebagai penerima manfaat. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan topik yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.[50] Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan dianggap paling penting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan koperasi sekaligus pengelola serta anggota koperasi sebagai penerima manfaat karena mereka mengetahui secara keseluruhan mengenai KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

[50] Ina Septiani. ”Pengembangan Objek Wisata Situ Cipanten Majalengka Di Tengah Kondisi *New Normal* Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)”, (*Proposal Skripsi*, Program Sarjana Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 20.

Wawancara adalah suatu percakapan yng diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk mengetahui serta melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.[51] Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, dan tetap fokus sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[52] Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[53] Dilihat dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta.[54] Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah jenis observasi tidak berperan serta yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoses melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk

---

[51] Ditha Prasanti. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, Vol 6 No 1 (Bandung, 2018), 17.

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R%D),* (Bandung: ALFABETA, 2016), 145.

[53] Ina Septiani. "Pengembangan Objek Wisata Situ Cipanten Majalengka Di Tengah Kondisi *New Normal* Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)", (*Proposal Skripsi*, Program Sarjana Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 20.

[54] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara . Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.[55] Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi berupa catatan-catatan kecil, audio, buku-buku dan gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang ada di dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validitas dan reliabilitas data.[56]

a. Uji Validitas

Validitas dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan pada kepastian apakah hasil penelitan sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum. Bisa dikatakan bahwa istilah validitas ini dapat disebut dengan *trustworthiness, authencity,* dan *credibility creswell.* Menurut Sugiono, terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Perbedaan dari keduanya ialah jika validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah penelitian tersebut dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel dapat diambil. Untuk itu uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[57]

1) Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melaukan pengecekkan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria

[55] Sandi Hesti Sondak, dkk. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA*, Vol 7 No 1, (Sulawesi, 2019), 675.
[56] http://digilib.uinsby.ac.id , Dikutip pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.
[57] http://digilib.uinsby.ac.id , Dikutip pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

yang lain di luar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subjek dengan informan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dngan dokumen yang berkaitan. Untuk itu, peneliti berusaha untuk mengecek kembali datayang diperoleh melalui wawancara.[58]

2) Menggunakan bahan referensi, di mana sebagai alat pendukung untuk membuktikan data yang ditentukan peneliti seperti hasil wawancara yang perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian inipenulis menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Untuk uji validitas eksternal, peneliti membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.[59]

b. Uji Reliabilitas

Penelitian kualitatif menggunakan uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian dengan cara dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen pembimbing skripsi untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian dari mulai bagaimana peneliti melakukan penelitian termasuk menentukan rumusan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, dan melakukan analisis data menggunakan uji keabsahan data hingga memperoleh kesimpulan akhir yang harus ditunjukan oleh peneliti. Jika peneliti tidak

[58] http://digilib.uinsby.ac.id , Dikutip pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.
[59] http://digilib.uinsby.ac.id , Dikutip pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

mempunyai dan tiak menunjukan jejak aktvitas lapangannya maka reliabilitas penelitiannya masih diragukan.[60]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[61] Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:[62]

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

---

[60] http://digilib.uinsby.ac.id , Dikutip pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R%D),* (Bandung: ALFABETA, 2016), 244.

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R%D),* (Bandung: ALFABETA, 2016), 246-252.

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka yang beralamatkan di Jl. Mutiara Komplek Ruko Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45472.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN , yang berisi Pendahuluan didalamnya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, yang berisi tentang Teori Peran dan Strategi, teori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), kemudian menjelaskan tentang teori Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat khususnya anggota KSPPS.

BAB III PROFIL KSPPS AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA, yang berisi tentang Sejarah KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Visi Misi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Struktur Kepengurusan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Alamat Kantor KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Kegiatan, Produk dan Strategi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

BAB IV PERAN DAN STRATEGI KSPPS AIMS CABANG RAJAGALUH DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN ANGGOTA, yang membahas tentang Hasil Penelitian didalamnya meliputi Program Pemberdayaan, Kendala dan Upaya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh Majalengka dalam peningkatkan

kesejahteraan anggota, serta Peran dan Strategi KSPPS AIMS Rajagaluh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut Permen RI Nomor 7 Tahun 2021.

BAB V PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON